

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA INDONESIA DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN (PROSPEK DAN TANTANGAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)

Ning Herlina

Universitas PGRI Palembang
e-mail: ning_141258@yahoo.com

Abstract: *The course of Citizenship Education has vision, mission, goals and competence in universities is a source of values and guidance in the development and implementation of study programs to deliver students to solidify their personality as a whole Indonesian man and nurture noble humanitarian character. The mission of civic education in college helps students to strengthen their personality to be consistently capable of realizing the basic values of Pancasila, the sense of nationality and love of the homeland throughout life in mastering, applying and developing the science of technology and art that it possesses with a sense of responsibility and firmly hold unity and the unity of the nation and state.*

Keywords: *Citizenship, Pancasila, Nation Character.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara yang berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, cerdas dan terampil menurut Helmi Hasan (2004) bahwa *Civic Education* itu adalah pembelajaran, dimana dosen dan mahasiswa harus mampu mengawasi kebijakan pemerintah (Hasan, 2004:26). Menurut Yulinar Nur (2004), ada tiga kompetensi yang harus diperhatikan dosen dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila yang mampu mengontrol kebijakan pemerintah (Nur, 2004:38), yaitu: (1). peserta didik mampu berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam merespon isu-isu Kewarganegaraan. (2). peserta didik mampu berpartisipasi secara cerdas serta bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3). peserta didik mampu membentuk diri berdasarkan kepada karakter-karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis.

Sebagaimana lazimnya semua mata kuliah, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan dan kompetensi di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan serta penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia

seutuhnya dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.

Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab serta memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dengan berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral dikalangan mahasiswa dalam rangka Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia didasari dengan: (1) kecintaan kepada tanah air, (2) kesadaran berbangsa dan bernegara, (4) emupuk rasa persatuan dan kesatuan, (5) keyakinan akan ketangguhan Pancasila, (6) rela berkorban demi bangsa dan negara.

Untuk mendasari tujuan tersebut, maka Direktur Jendral Pendidikan Tinggi memandang perlu menyempurnakan Kurikulum Inti Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewiraan yang ditetapkan dengan keputusan Dirjen Dikti Nomor : 151 / DIKTI / Kep/ 2000, menjadi kurikulum inti Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian sebagai keseragaman terakhir tahun 2006, berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor : 43 / DIKTI / KEP / 2006 tentang

Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang di dalamnya mencantumkan substansi kajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan dan konsisten cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kompetensi secara singkat diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas yang berkewenangan untuk menentukan sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar mampu melaksanakan tugas dalam bidang tertentu. Kompetensi lulusan pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari seorang warga negara dalam hubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi Filsafat Pancasila, menerapkan Konstitusi Negara dalam kehidupan sehari-hari serta Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan menghasilkan sikap mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang: a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai filsafat hidup bangsa dan negara. b. Berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur serta berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c. Berjiwa nasionalisme yang kuat, mengutamakan persatuan dan kesatuan mengatasi kelompok dan seseorang. d. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara serta sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. e. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. Dengan dasar lima perilaku di atas dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang diterapkan pada pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk memperluas cakrawala berpikir para mahasiswa sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai pejuang bangsa dalam usaha menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional.

Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin nasional di masa mendatang yang memiliki kemampuan sebagai berikut: Mampu menghayati dan mengimplementasikan filsafat

Pancasila serta Konstitusi negara Indonesia. Mampu memahami geopolitik dan geostrategi. Istilah kewarganegaraan berasal dari kata warga negara yang secara singkat berarti sekelompok manusia yang menjadi anggota suatu negara. Pengertian secara umum warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya dan mempunyai hubungan hak serta kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara diatur dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan di bawahnya.

Dalam UUD 1945 memuat tentang hak asasi manusia, yaitu kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Seperti setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Kemampuan warga negara suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna sangat memerlukan pembekalan masa depannya. Pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan atau nilai religius dan nilai budaya bangsa sebagai panduan atau petunjuk kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara.

Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap, perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan dan kemauan yang luar biasa.

Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus terus-menerus ditingkatkan guna menjawab tantangan masa depan, sehingga para alumni memiliki semangat juang dan kesadaran bela negara yang tinggi sesuai bidang profesi masing-masing demi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memberikan pemahaman filosofis yang meliputi pokok-pokok bahasan mengenai: Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, Hak Asasi Manusia, Geopolitik dan Geostrategi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan model cippo dengan pendekatan penelitian kualitatif sebagai berikut : (1). Pendekatan Filsafat; (2). Pendekatan Perundang-undangan ; (3). Pendekatan Konseptual; (4). Pendekatan Analitis (Best, 1982: 55).

Pendekatan penelitian ini tertuju pada Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, sehingga dapat mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila untuk membangun karakter bangsa Indonesia di Universitas PGRI Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan secara keseluruhan akan ditentukan oleh pencapaian tujuan pendidikan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan pendidikan.

Metode penelitian merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian dan ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Untuk menunjang penulisan disertasi ini, harus diperhatikan jenis penelitian apa yang sebaiknya digunakan serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang tepat untuk mendukung penulisan penelitian ini.

Penelitian evaluasi berfokus pada menilai efektivitas pendidikan tertentu atau tindakan dalam memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode survei evaluatif untuk melakukan kegiatan penelitian ini.

Metode survei evaluatif ialah survei untuk mengevaluasi suatu pendidikan, baik yang dilakukan pada pelaksanaan suatu pendidikan yang sedang berlangsung (evaluasi formatif) maupun evaluasi yang dilaksanakan pada akhir suatu pendidikan (evaluasi sumatif) (Fathoni, 2011:101).

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif pada dasarnya tinjauan pustaka bertumpu secara mendasar pada fenomenologi dan menggali makna dalam penelitian. Fenomenologi dijadikan sebagai konsep dasar utama yang lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan dan etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatarbelakangi secara teoritis penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Proses Pembangunan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila dalam Membentuk Karakter Generasi Muda Indonesia Khususnya bagi Mahasiswa Universitas PGRI Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli: Tim ICCE UIN Jakarta: "Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional."

Henry Randall, *civics* adalah ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan: (a). Manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (sosial, ekonomi, politik). (b). Individu-individu dengan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk generasi muda sebagai warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara.

Menurut Kristiawan (2016) pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Kemudian temuan Kristiawan (2015) juga menyebutkan *Indonesia needs a great quantity and quality of human resources as the main supporter of the development*. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter mahasiswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan disini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Lickona menyatakan pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.

Suyanto (2009) mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup serta bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga,

masyarakat, bangsa maupun Negara (Suyanto, 2009:44).

Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misal: kejujuran seseorang yang berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap (Dali Gulo, 1982:29).

Dalam pendidikan formal, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan satu-satunya Mata Kuliah yang langsung memberikan pendidikan tentang kewarganegaraan dan membangun karakter peserta didik (Character Building) sesuai dengan Pancasila. Jika materi Pendidikan Kewarganegaraan dengan meninggalkan Pancasila sebagai karakter yang harus diterapkan kepada peserta didik, dikhawatirkan ke depannya generasi muda Indonesia semakin mengalami keterpurukan karakter atau karakter yang buruk (bad character). Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan negara ini, sekarang saja sudah terlihat dampaknya, maraknya tawuran pelajar / mahasiswa dan masyarakat yang sudah menjurus kepada tindakan kriminal serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelajar / mahasiswa / masyarakat dan sebagainya.

Dampak dari Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila untuk Membangun Karakter Bangsa Indonesia

Untuk mewujudkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan karakter yang mengandung moral, nilai dan demokrasi serta Pancasila, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan dosen Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: (1). Dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan komprehensif, baik komprehensif dalam isi, metode, maupun dalam keseluruhan proses pendidikan. Isi Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai pribadi sampai nilai-nilai etika yang bersifat umum. (2). Metode perkuliahan yang digunakan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan, harus mengembangkan perkuliahan aktif dengan menggunakan banyak metode belajar seperti: ceramah, tanya jawab, klarifikasi nilai melalui mengamati / mengobservasi, analisis nilai melalui pemecahan masalah / kasus dan diskusi kelas untuk menanamkan nilai berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif. (3). Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila hendaknya menjadi model atau contoh bagi peserta didik sebagai dosen yang berkarakter. Jadi dalam setiap sikap dan tindakan dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan

Pancasila harus menggambarkan karakter yang diinternalisasikan kepada peserta didiknya. (4). Untuk mewujudkan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan karakter maka harus menciptakan kultur perguruan tinggi yang kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik, berupa: norma-norma, nilai-nilai, sikap, harapan-harapan dan tradisi yang ada diwariskan dan dipegang bersama yang mempengaruhi pola pikir, sikap dan pola tindakan seluruh warga perguruan tinggi. Karena kultur perguruan tinggi yang positif dan sehat akan berdampak pada motivasi, prestasi, produktivitas, kepuasan serta kesuksesan mahasiswa dan dosen.

Banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter di kalangan generasi muda, yaitu: (a). Pendidikan agama sebagai salah satu media / sarana pendidikan karakter di kalangan generasi muda sehingga dapat dijadikan landasan pembangunan kecerdasan emosi dan spiritual dimana suara hati adalah menjadi landasannya. (b). Pendidikan keluarga sebagai salah satu media / sarana pendidikan karakter di kalangan generasi muda.

Untuk pembentukan karakter salah satunya adalah faktor keluarga dan pendidikan. Keluarga (pendidikan) adalah sebuah unit yang membangun bangsa dan untuk itulah negara dibangun. Keluarga adalah tempat dimana karakter anak dibentuk dimana pendidikan dimulai dan dipupuk, dimana norma pengambilan keputusan oleh si anak diciptakan. Seperti "refleksi" dalam majalah Nirmala mengungkapkan bahwa : jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangkan dirinya dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.

Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting. Di negara Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pruralisme yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif dan kreatifitas. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Tanpa pendidikan kewarganegaraan yang tepat akan lahir masyarakat egois. Tanpa penanaman nilai-nilai kewarganegaraan, keragaman yang ada akan menjadi penjara dan neraka dalam arti menjadi

sumber konflik. Pendidikan, lewat kurikulumnya, berperan penting dan terkait dengan strategi kebudayaan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses yang dilakukan lembaga sebagai pendidikan politik bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara secara politik dan ikut membangun sistem politik yang demokratis.

Dalam buku Pendidikan Karakter oleh Prof. Darmiyati Zuchdi, EEd. D., dkk mengemukakan bahwa Wynne (1991) istilah karakter diambil dari bahasa Yunani yang berarti 'to mark' (menandai). Istilah ini lebih difokuskan pada bagaimana upaya pengaplikasian nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh karena itu peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter muda dapat dimulai dari pembentukan karakter salah satunya adalah faktor keluarga dan pendidikan. Keluarga (pendidikan) adalah sebuah unit yang membangun bangsa dan untuk itulah negara dibangun. Keluarga adalah tempat dimana karakter anak dibentuk dimana pendidikan dimulai dan dipupuk, dimana norma pengambilan keputusan oleh si anak diciptakan.

Karakter warga negara yang baik merupakan tujuan umum yang ingin dicapai dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di negara-negara mana pun di dunia. Sebagai contoh, di Kanada pembentukan karakter warga negara yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan diserahkan kepada pemerintah negara-negara bagian. Dalam konteks Indonesia, di era orde baru pembentukan karakter warga negara tampak ditekankan kepada mata kuliah seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Di era pasca orde baru, kebijakan pendidikan karakter pun ada upaya untuk menitikapkannya melalui pendidikan agama di samping pendidikan kewarganegaraan.

Persoalan apakah nilai-nilai pembangunan karakter yang diajarkan dalam setiap mata kuliah harus bersifat eksplisit ataukah implisit saja dan perlu dilakukan agar dapat dipahami betapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan di setiap periode kehidupan bernegara di Indonesia untuk membangun warga negara yang baik meskipun dengan aksentuasi yang berbeda.

Beberapa konsep tentang pendidikan kewarganegaraan, (Cogan 1998:5) mengartikan pendidikan kewarganegaraan berperan penting sebagai penyiapan generasi muda (mahasiswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki identitas dan kebanggaan nasional, memiliki pengetahuan dan kecakapan serta nilai-nilai yang diperlukan untuk

menjalankan hak dan kewajibannya. Penelitian IEA terhadap implementasi pendidikan kewarganegaraan di 28 negara secara umum ditemukan bahwa komponen pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek civic knowledge, civic engagement dan civic attitudes serta konsep lainnya (Torney-purta, et.al, 2001:179).

Seperti diketahui, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ada. Dalam Encyclopedia of Educational Research dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat dibagi 2, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pendidikan kewarganegaraan membahas masalah hak dan kewajiban. Sedangkan dalam arti luas, pendidikan kewarganegaraan membahas masalah moral, etika dan sosial serta berbagai aspek kehidupan ekonomi (Suriakusumah, 1992). Sedangkan Turner dkk., mengungkapkan bahwa civics merupakan suatu studi tentang hak-hak dan kewajiban dari warga negara. Sedangkan dalam standar kompetensi perkuliahan ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan (citizenship education) adalah merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkepribadian yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata kuliah yang dirasa menjadi sangat penting karena fungsinya yang membentuk kepribadian anak karena mengajarkan anak tentang pendidikan moral, pendidikan nilai ataupun pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti adalah suatu proses pembentukan perilaku atau watak seseorang, sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mampu menerapkannya dalam kehidupan.

Ini membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai mata kuliah yang mengajarkan pendidikan moral bangsa.

Tanpa pendidikan kewarganegaraan, akan mustahil mendapatkan pendidikan moral. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini bukan hanya mengajarkan bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik, tapi juga mengajarkan bagaimana rasa tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara. Dengan diberikannya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, maka pribadi seseorang akan terbentuk. Yaitu pribadi yang mencintai negaranya

dan pribadi yang luar biasa santunnya. Apabila moral yang baik tersebut telah terbentuk, maka akan susah sekali menciptakan seseorang yang suka korupsi, melanggar aturan, merugikan negara, atau bahkan mempermalukan negaranya sendiri.

Menurut Maika Sandra Puspita seorang mahasiswa yang merasakan pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan mengatakan, "Kita memang harus mempelajari pendidikan kewarganegaraan karena pembahasannya yang begitu penting dan menjadikan kita menjadi seorang warga negara yang bermoral." Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika moral sudah tertanam, maka untuk mempelajari pelajaran apapun, kita tidak akan menyeleweng karena moral kebaikan telah tertanam secara kuat. Apalagi dengan adanya manfaat yang telah disebutkan diatas, sudah seharusnya warga negara Indonesia, wajib mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Pembentukan pribadi manusia yang bermoral tersebut di Indonesia, diprasaranai oleh pendidikan kewarganegaraan.

Dengan demikian, selain membentuk manusia yang berbangsa dan bernegara, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan moral atau pendidikan nilai atau pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti yang membentuk manusia yang berkepribadian baik sesuai dengan nilai, norma dan peraturan yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk generasi muda sebagai warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter mahasiswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan disini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Lickona menyatakan pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.

Dalam kultur perguruan tinggi yang positif dan sehat akan berdampak pada motivasi, prestasi, produktivitas, kepuasan serta kesuksesan mahasiswa dan dosen. Banyak faktor yang

mempengaruhi pembentukan karakter di kalangan generasi muda, yaitu: (a). Pendidikan agama sebagai salah satu media / sarana pendidikan karakter di kalangan generasi muda sehingga dapat dijadikan landasan pembangunan kecerdasan emosi dan spiritual dimana suara hati adalah menjadi landasannya. (b). Pendidikan keluarga sebagai salah satu media / sarana pendidikan karakter di kalangan generasi muda. Untuk pembentukan karakter salah satunya adalah faktor keluarga dan pendidikan. Keluarga (pendidikan) adalah sebuah unit yang membangun bangsa dan untuk itulah negara dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulrahman Fathoni. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
2. Dali Gulo. 1982. *Kamus Psikologi*. Jakarta: Gramedia John W. Best. 1982. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
3. Helmi Hasan. 2004. *Civic Education*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
4. Kristiawan, M. (2015). A Model of Educational Character in High School Al-Istiqamah Simpang Empat, West Pasaman, West Sumatera. *Research Journal of Education*, 1(2), 15-20.
5. Kristiawan, M. (2016). Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai dan Berakhlak Mulia. *Ta'dib*, 18(1), 13-25.
6. Nur, Yulinar. 2004. *Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
7. Suyanto. 2009. *Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Litera.
8. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
9. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.
10. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 tentang *Kewarganegaraan*.